

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tahapan yang menggaambarkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek, salasatunya peningkatan pendapatan perkapita yang diikuti oleh pertumbuhan jumlah penduduk (Sukirno, 2010). Dalam hal ini pembangunan ekonomi menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat yang ditandai oleh peningkatan pendapatan perkapita dalam setiap tahunnya. Dalam memahami dan mengamati indikator keberhasilan didalam pembangunan ekonomi maupun keberlanjutan ekonomi itu sendiri suatu daerah, bisa dilihat dari persentasi pertumbuhan ekonomi dari perioede ke periode (biasanya tahunan). Pertumbuhan ekonomi yang meningkat setiap tahunnya serta berkelanjutan ialah kondisi utama untuk kelangsungan pembangunan ekonomi (Suparno, 2015) .

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah merupakan suatu pencapaian pembangunan kebijakan pemerintah pusat dan daerah, baik dari sisi moneter maupun fiskal dengan harapan dan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Didalam proses mensejahterakan kehidupan masyarakat atau mencari titik keseimbangan dalam roda perekonomian tidak terlepas dari mekanisme peran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur pengeluaran maupun penerimaan pemerintah daerah.

Mengacu pada Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 298 ayat (1) menjelaskan bahwa belanja pemerintahan daerah di prioritaskan untuk membiayai operasional semua urusan pemerintahan, harus terpaut pelayanan dasar yang ditetapkan pelayanan standar minimal, kemudian di pertegas di ayat (6) dan (7) dimana berisi bahwa belanja bagi hasil, dorongan keuangan, serta belanja desa dianggarkan dalam APBD serta Dana Alokasi Khusus di prioritasskan untuk kegiatan fisik maupun non fisik sesuai perundang undangan.

Didalam pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, sektor kesehatan dan sektor pendidikan ialah salah satu pengeluaran pemerintah yang bersifat aktif dan mendasar. Dimana sektor kesehatan dan pendidikan berfungsi dan berperan dalam pengembangan dan keterampilan sumber daya manusia itu sendiri. Tenaga yang terdidik dan sehat jasmani lebih mempunyai peluang output lebih besar dan terampil. Terdidiknya serta berkembangnya sumber daya manusia menjadikan terdorongnya perkembangan ekonomi secara menyeluruh di suatu daerah hingga negara itu sendiri. Negara memprioritaskan anggaran kesehatan sebesar lima persen sesuai dengan Undang Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan pendidikan minimal dua puluh persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD).

Masalah anggaran kesehatan merupakan salah satu dari beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah Provinsi Jawa Barat hinga saat ini. Terdapatnya masalah efektif dan efisiensi dalam pemanfaatan anggaran tersesebut,

yang mana sulitnya melakukan analisis biaya "*costing*". Sehingga tidak bisa menjelaskan dari mana sumberdana tersebut, kemana dana itu mengalir dan barang atau jasa apa yang dibeli, hingga siapa yang merima manfaat tersebut.

Health Account merupakan sebuah kumpulan data yang menggambarkan aliran biaya dalam penyelenggran kesehatan sehingga bisa di dapatkan gambaran akan biaya pembiayaan kesehatan secara menyeluruh. Namun belum berjalan sebagaimana mestinya, terlihat di Provinsi Jawa Barat hanya satu kabupaten yang membuat laporan *Health Account* selama tiga tahun kebelakang. Kemudian terdapat pula masalah dalam anggaran pendidikan yaitu rendahnya anggaran yang dikucurkan. Pada tahun 2018 anggaran alokasi fungsi pendidikan sebesar 16T, namun yang dikucurkan oleh pemerintah daerah melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hanya sebesar 7,9T dan sisanya untuk belanja publik. Selain itu, masalah dihadapi dunia pendidikan Jawa Barat yaitu tipologi anggaran pendidikan, arah serta tujuan pendidikan dan kinerja kualitas pendidik yang masih kurang mumpuni.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah bagian dari penerimaan pemerintahan daerah yang didapatkan melalui tiga sumber yang mendasar sesuai perundang undangan, yaitu pertama pajak yang dihasilkan daerah (*regional tax*), kedua retribusi daerah (*regional retribution*) dan ketiga pendapatan lain lain (*other income*) yang diatur oleh perundangan undangan (dalam artian pendapatan yang sah). Mengacu dan melihat Undang Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pendapatan yang diterima daerah di pungut oleh pemeintahan daerah sesuai perundang undangan. Setiap tahunnya Provinsi Jawa Barat untuk pendapatan asli

daerah mengalami kenaikan sesuai target namun belum optimal, hal ini dilandasi atas belum menyeluruhnya pembangunan dan masih ada ketimpangan pendapatan antara pedesaan dan perkotaan sehingga perlu adanya keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengintervensi.

Grafik I. I Pertumbuhan Pengeluaran di Sektor Kesehatan Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat 2010-2019

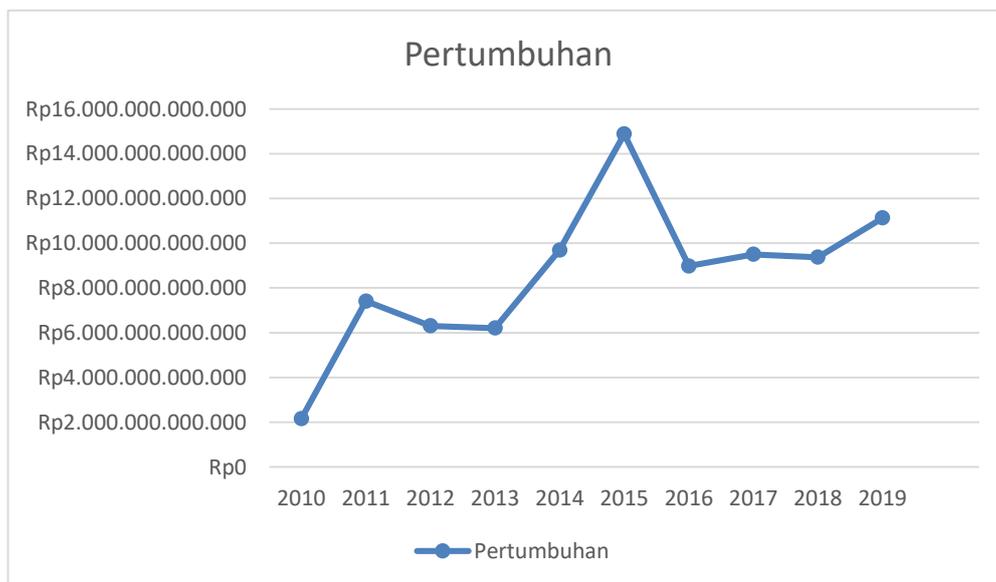


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan **Grafik 1.1.** diatas terlihat bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan provinsi Jawa Barat mengalami penurunan dan kenaikan di tahun tertentu. Hal ini dari tahun 2010 -2014 pengeluaran di sektor kesehatan mengalami kenaikan dan penuurunan yang fluktuatif dikarenakan berupaya menggarap

pembangunan puskesmas poned sebanyak 200 bangunan, selain itu dilakukan upaya menekan kematian ibu dan anak serta penangan gizi buruk. Pada tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Pertumbuhan tersebut di latarbelakangi oleh menurunnya angka rasio kematian ibu yang mengandung dan bayi yang dilahirkan serta prevalensi angka rasio gizi buruk, dengan pertumbuhan 6,72 persen atau setara dengan Rp4.584.061.845.628 pada 2015. Pertumbuhan tertinggi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 726,36 persen atau setara dengan Rp28.896.386.742.309. Sehingga rata rata pertumbuhan pengeluaran di sektor kesehatan periode 2010-2019 sebesar 171,07 persen.

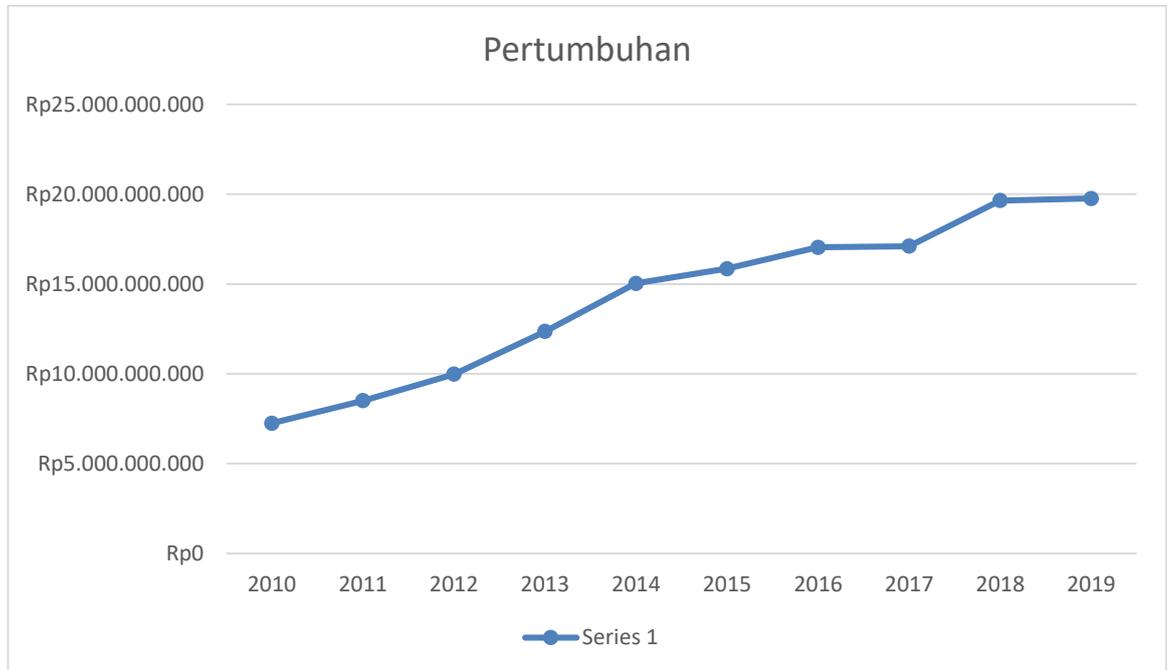
Grafik I. II Grafik Persentase Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik 1.2 diatas pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan setiap tahunnya mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan terdapat dua sektor umum yaitu dana alokasi khusus fisik (*the physical specific allocation fund*) dan dana alokasi khusus non fisik (*the non physical specific allocation fund*). Dana alokasi khusus fisik meliputi regular, penugasan, dan afirmasi. Kemudian DAK non fisik meliputi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG), dana Tunjangan Khusus Guru (TKG), dana Tambahan Penghasilan (TAMSIL), dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD), dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan. Pertumbuhan pengeluaran sektor pendidikan tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 53,52 persen setara dengan Rp14.874.719.561.000. Tetapi pada tahun 2016 terjadi penurunan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan sebesar -39,62 persen. Secara keseluruhan rata rata pertumbuhan pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dari tahun 2010-2019 sebesar 25,07 persen.

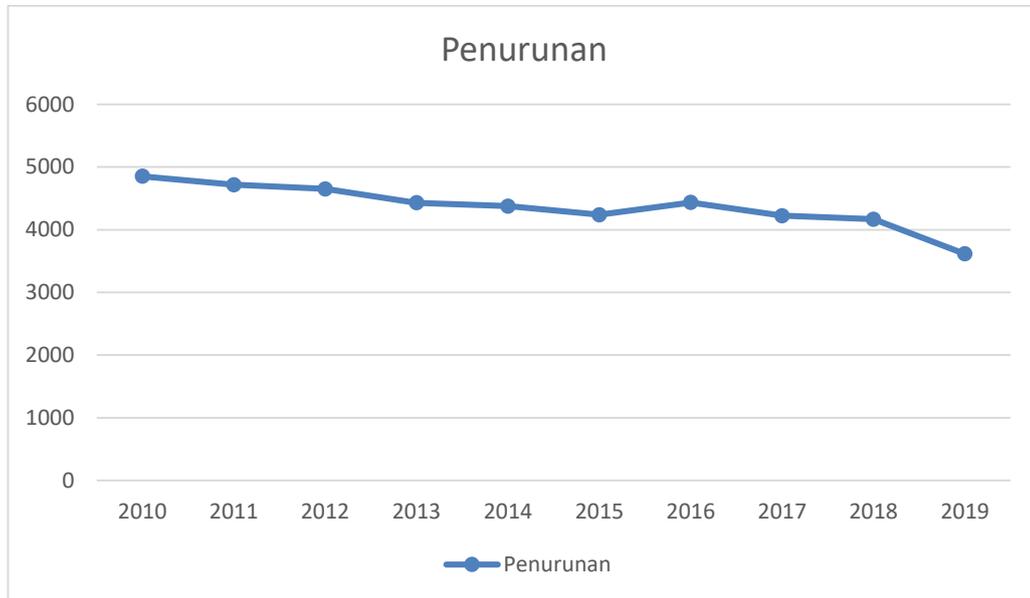
**Grafik I. III Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 1.3 diatas Pendapatan Asli Daerah mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Pada tahun 2010 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp7.252.242.913 dan terus mengalami kenaikan cukup signifikan hingga tahun 2014 sebesar Rp15.038.153.310. Namun pada periode antara tahun 2015-2017, Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan tetapi dibawah 10 persen, hingga pada tahun 2018 pendapatan asli daerah (PAD) mengalami kenaikan cukup signifikan yaitu sebesar 14,85 persen setara dengan Rp19.642.915.449. Sehingga rata rata pertumbuhan pendapatan asli daerah Provinsi Jawa Barat dari tahun 2010-2019 sebesar 13,89 persen.

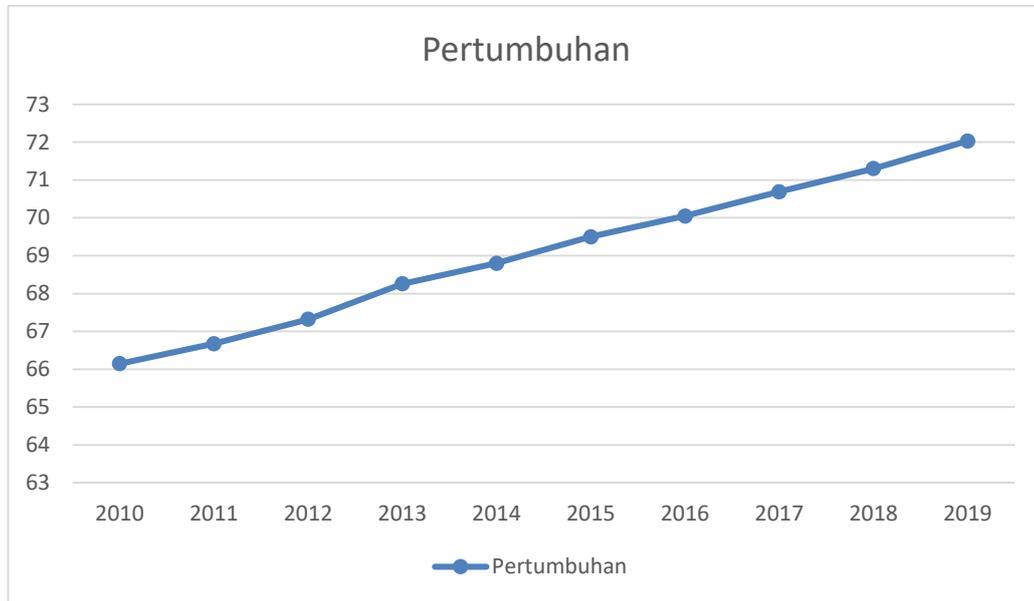
Grafik I. IV Penurunan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 1.4 diatas, jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan yang cukup stabil antara tahun ketahun. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi perkapita cenderung naik pada periode 2010-2019. Namun pada 2016 ada peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 4,64 persen setara dengan 4.435 jiwa , dimana disebabkan disparitas penduduk miskin masih tinggi antara kota dan desa. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2019 sebesar 13,26 persen atau setara dengan 3.615 jiwa penduduk miskin, sehingga rata-rata penurunan jumlah jiwa penduduk miskin di Jawa Barat antara 2010-2019 sebesar 3,56 persen.

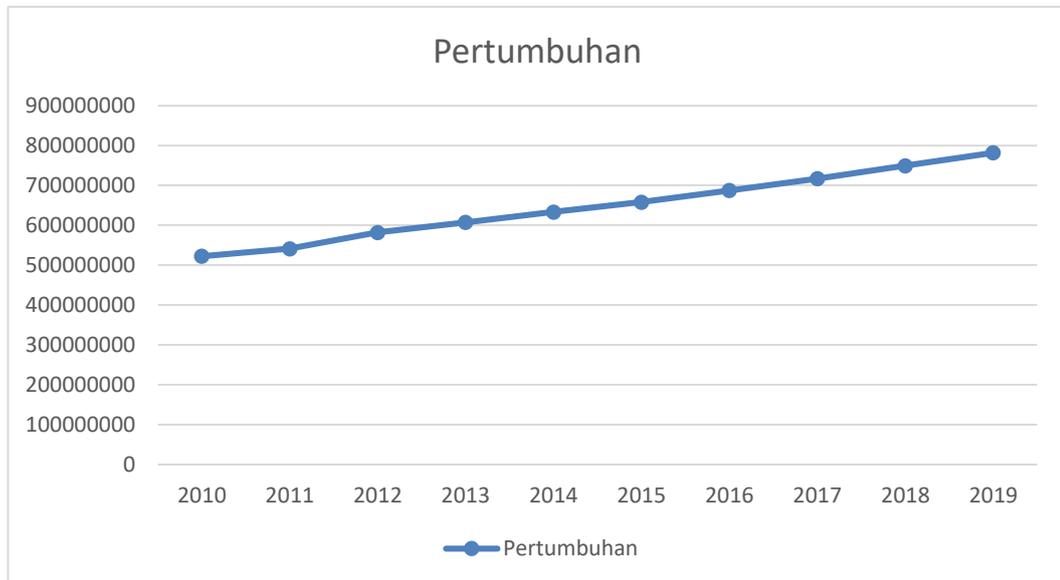
**Grafik I. V Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2019**



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik 1.5 diatas, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami pertumbuhan yang cukup stabil. Hal ini dikarenakan Angka Harapan Hidup cenderung naik dan Angka Kematian Bayi cenderung menurun terutama Kabupaten Bandung, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Bogor, Kota Depok dan Kota Cimahi. Pada tahun 2013 terjadi peningkatan pertumbuhan tertinggi antar tahun sebesar 1,39 persen atau setara dengan 68,25 persen. Sehingga rata rata pertumbuhan periode 2010-2019 sebesar 0,09 persen.

Grafik I. VI Pertumbuhan Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Periode 2010-2019



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Grafik1.6 diatas, dapat dilihat bahwa pendapatan perkapita mengalami pertumbuhan yang cukup stabil antar tahun. Pertumbuhan tertinggi dalam periode 2010-2019 antar tahun terjadi pada tahun 2018 sebesar Rp27.759.385 atau setara dengan 4,54 persen. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang cenderung naik serta penurunan jumlah jiwa penduduk miskin . Sehingga rata rata pertumbuhan pendapatan perkapita provinsi Jawa Barat sebesar 3,77 persen.

1.2 Rumusan Masalah

Didalam penelitian ini dapat dikatakan adanya peningkatan dari segala aspek, namun rata rata pertumbuhan cukup lambat dan fluktuatif. Seperti pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan yang pertumbuhannya berkisar

antara 15,37 persen sampai 25,07 persen tenggang waktu selama sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan pengeluaran pemerintah dibidang kesehatan berkisar 171,07 persen dalam tenggang waktu sepuluh tahun terakhir. Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar antara 11,13 persen sampai 13,89 persen selama kurun waktu sepuluh tahun. Kemudian penurunan kemiskinan sebesar antara 3,70 persen sampai 3,56 persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia berkisar 0,09 persen sampai 0,5persen dalam kurun waktu sepuluh tahun. Dan pertumbuhan Pendapatan perkapita berkisar sebesar antara 3,77 persen sampai 4,2 persen dalam waktu sepuluh tahun.

Walaupun pertumbuhan pengeluaran pemerintahan daerah Jawa Barat di bidang pendidikan dan bidang kesehatan meningkat tinggi namun cukup fluktuatif serta meningkatnya pendapatan asli daerah cukup signifikan, akan tetapi hal tersebut tidak sejalan dengan persentase indeks pembangunan manusia dan jumlah jiwa penduduk miskin sehingga mempengaruhi secara keseluruhan pendapatan per kapita itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan dan bukti data dilapangan tersebut, maka dapat dan bisa ditarik masalah pokok pembahasan yang akan diteliti dan dibahas yaitu: “Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah dibidang pendidikan dan kesehatan, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pendapatan perkapita di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2010-2019”.

1.3 Tujuan Penelitian

Didalam tujuan penelitian ini adalah “Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, Pendapatan Asli Daerah, Jumlah penduduk miskin, dan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Barat terhadap pendapatan perkapita di Jawa Barat 2010-2019”.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini ada beberapa manfaat diantaranya:

1. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerimaan dan pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan perkapita.
2. Bagi akademisi atau peneliti, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi atau riset untuk penelitian selanjutnya.
3. Bagi para pihak yang berwenang dalam mengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai referensi dan pertimbangan untuk kebijakan dalam upaya kesejahteraan masyarakat yang tercermin dari pendapatan per kapita.